

Arief Minta OPD Susun Rumusan Peraturan Kemudahan Bayar Pajak

TANGERANG (IM) - Wali Kota Tangerang, Provinsi Banten, Arief R Wisnansyah meminta kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membuat rumusan peraturan yang bisa membuat masyarakat senantiasa taat membayar pajak.

"Jangan sampai regulasi yang dibuat justru mempersulit masyarakat dan juga pemerintah itu sendiri," katanya dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 di Serpong, Jumat (10/3).

Ia mengatakan pajak merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Maka itu, peraturan yang kini digodok oleh Pemkot Tangerang bertujuan untuk optimalisasi pendapatan daerah melalui

sektor pajak.

"Intinya harus didukung dengan aturan yang sederhana dan memudahkan masyarakat selaku wajib pajak," ujarnya.

Kemudian dirinya juga berharap pembangunan yang dilakukan oleh OPD terkait harus optimal agar masyarakat puas dengan hasil dari pajak yang dibayarkan.

Sementara itu terkait Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah, dijelaskan, peraturan daerah tersebut bisa memacu peningkatan investasi di kota Tangerang, terlebih di tengah ancaman resesi ekonomi global akibat pandemi dan perang Rusia-Ukraina.

"Peraturan yang baru nanti harus bisa mendorong kemudahan berusaha di kota Tangerang," demikian Arief R Wisnansyah. ● pp

Wali Kota Ajak Pihak Swasta Terlibat Program 'Tangsel Green And Clean'

TANGSEL (IM) - Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie mengajak seluruh pemangku penting mulai dari pihak swasta, sekolah, kelompok masyarakat, pemerintah, media, hingga tingkat RT untuk terlibat dalam program "Tangsel Green and Clean" sebagai upaya menata lingkungan.

"Saya berharap kepada seluruh warga Tangerang Selatan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Green and Clean Tangerang Selatan ini. Ada 54 kelurahan jadi ikut semua," kata Wali Kota Benyamin di Tangerang Jumat (10/3).

Dijelaskannya program Tangsel green and clean merupakan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepedulian lingkungan yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ia menambahkan dari program ini nantinya terwujud lingkungan yang hijau, bersih dan nyaman sebagai tempat tinggal. Tak hanya itu saja, terdapat juga pengelolaan sampah oleh warga.

"Dengan banyak partisipasi yang positif dari

seluruh elemen masyarakat, akan menjadikan ajang ini sebagai momentum untuk terus menjadikan Tangerang Selatan lebih hijau dan bersih, sehingga layak untuk dikediri dan selalu ingin dikunjungi," katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, Wahyunoto Lukman mengatakan bahwa program ini jadi bentuk upaya mencapai target RPJMD, dan sesuai visi yakni terwujudnya Tangsel unggul menuju kota lestari saling terkoneksi, efektif dan efisien.

"Bagaimana kita harus mampu menangani sampah. Ya alhamdulillah berkat dukungan semua pihak, kota Tangerang Selatan mampu menangani sampah," kata beliau.

Untuk itu, lanjut Wahyunoto, komitmen penanggulangan sampah dan lingkungan harus terus semakin ditingkatkan dan melibatkan semua pihak yang ada di Tangerang Selatan.

"Program ini merupakan platform kolaborasi dan sinergi multi sektor, dan seluruh lapisan masyarakat," katanya. ● pp

Hengky Kurniawan Pastikan Pemilu 2024 di KBB Sukses

BANDUNG (IM) - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) optimistis, pelaksanaan Pemilu 2024 akan berlangsung sukses.

Optimisme itu terlonjar sesuai Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan menggelar rapat dengan KPU dan Panwaslu KBB di Kantor Pemkab Bandung Barat, belum lama ini.

Dalam laporan KPU KBB, terungkap bahwa Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang dikirim dari Kemendagri sesuai dengan kartu keluarga di KBB.

"Alhamdulillah DP4 dan Kartu Keluarga, semuanya sesuai," ujar Kang Hengky.

Menindaklanjuti DP4 yang diterima dari Kemendagri, KPU KBB melakukan tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlil). Tahapan coklit di KBB berlangsung sejak 12 Februari hingga 14 Maret 2023.

Hengky mengimbau seluruh masyarakat KBB turut mendukung dan menerima para petugas coklit yang akan berkunjung ke rumah-rumah warga.

"Mari kita dukung dan sukseskan pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024," tambahnya.

Kata Hengky, Pemilu merupakan pesta de-

mokrasi, sehingga harus diikuti dengan berbahagia. Pihaknya optimistis, Pemilu 2024 di KBB akan berlangsung sukses dan berkualitas.

Untuk itu, pihaknya mengajak semua pihak untuk sama-sama mengawal dan mendukung Pemilu 2024.

Hengky meminta KPU KBB untuk memastikan seluruh hak politik masyarakatnya terfasilitasi di Pemilu 2024.

"Jangan sampai ada warga yang tidak bisa menyalurkan hak politiknya," tegasnya.

Sementara Ketua KPU KBB, Adi Saputro mengharapkan seluruh masyarakat KBB dapat terdapat dengan baik dalam tahapan coklit kali ini.

Dengan demikian, dapat diperoleh data yang lebih akurat sebagai dasar yang akan digunakan sebagai DPS untuk ditetapkan DPT Pemilu 2024.

"Hasil coklit ini akan menjadi dasar dalam menentukan DPS yang akan dijadikan DPT," kata Adi.

Secara umum, pendataan coklit berjalan dengan baik.

Sedikit kendalanya, tutur dia, yakni kondisi geografis Bandung Barat yang menjadi tantangan petugas di lapangan.

Meski demikian, pihaknya masih dapat menjangkau semuanya secara langsung sebagaimana mestinya. ● pra

8 | Nusantara

IDN/ANTARA



KAMPANYE KESELAMATAN DI JALAN TOL

Group Chief Operating Officer Astra Infra Kris Ade Sudiyo (tengah) menempelkan stiker reflektor pada kendaraan saat kampanye keselamatan berkendara di rest area KM 130 Tol Cipali, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (10/3). PT Astra Tol Cipali bersama Kementerian Perhubungan mensosialisasikan gerakan keselamatan berkendara kepada pengguna jalan yang melintas di Tol Cipali untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

Pemkot Bogor Akan Cek Kembali Kondisi Korban Longsor Gang Barjo

Para korban longsor sempat mendapat bantuan tempat tinggal sementara atau kontrakan selama sekitar dua bulan.

Namun, setelah dua bulan nasib para korban kini tidak jelas, karena tempat tinggal asli mereka kini tidak boleh lagi dibangun kembali karena termasuk dalam wilayah rawan bencana.

BOGOR (IM) - Nasib korban longsor di Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kalapa, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, masih terkatung-katung usai tertimpa bencana pada Oktober 2022. Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengaku,

akan mengecek kondisi para korban seperti apa.

Informasi dihimpun, para korban longsor sempat mendapat bantuan tempat tinggal sementara atau kontrakan selama sekitar dua bulan. Namun, setelah dua

bulan nasib para korban kini tidak jelas, karena tempat tinggal asli mereka kini tidak boleh lagi dibangun kembali karena termasuk dalam wilayah rawan bencana.

"Kalau untuk tempat tinggal sudah pasti akan kami fasilitasi. Ada masa waktunya kami akan swakan tempat, rumah, dan sebagainya. Kami akan melihat masalahnya apa, kami identifikasi lagi persoalannya apa," kata Bima Arya, Jumat (10/3).

Bima Arya pun menanggapi terkait lahan pribadi milik para korban longsor yang tidak dapat dibangun kembali. Menurutnya, jika memang tidak bisa dibangun rumah kembali, mau tidak mau warga korban

longsor harus direlokasi.

Dia menuturkan, rencana relokasi warga ini merupakan arahan dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK), Muhadjir Effendy dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, agar daerah berisiko bencana tidak lagi dibangun rumah.

"Kami tentu akan berkomunikasi dengan beliau, untuk bisa memikirkan relokasi. Itu memang kalau tidak bisa dibangun. Itu saya akan cek lagi titiknya di sana," ujar Bima Arya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, Juniarti Estiningsih,

mengaku pihaknya belum bisa banyak terkait eks lokasi longsor Gang Barjo. Namun, dari rencana sementara, lahan eks lokasi longsor akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Terkait lahan pribadi milik warga, Esti memperkirakan, akan ada solusi melalui mekanisme land banking. Kendati demikian, pihaknya masih membuat studi kelayakan atau feasibility study (FS) terkait rencana tersebut.

Saat ini, Esti memastikan di lokasi tersebut sudah tidak ada lagi rumah. "Kami sedang membuat FS terkait land banking atau pembelian lahan tersebut. Termasuk pemetaan. Di situ (sebelumnya) ada tiga rumah," ucap Esti. ● jay

Plt Bupati Bogor Ingin Ada Integrasi Data UMKM Antara Pemkab Dengan Kadin

BOGOR (IM) - Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan ingin adanya integrasi data UMKM yang dimiliki Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bogor.

Pasalnya data tersebut bisa menjadi dasar untuk membuat kebijakan yang berpihak untuk UMKM di Kabupaten Bogor.

Keinginan tersebut ia sampaikan usai membuka Rapimkab II Kadin Kabupaten Bogor sekaligus peluncuran UMKM Satu Data, di Sentul Highlands Golf Club, Babakan Madang, Kamis (9/3). Hadir pada acara tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Ketua Umum Kadin Kabupaten Bogor, perwakilan Forkopimda, dan perwakilan Kadin Kabupaten Kota lain.

Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengungkapkan, hari ini Kadin Kabupaten Bogor meluncurkan program UMKM Satu Data. Ini adalah big data yang harus kita tangkap dan tindaklanjuti. Jadi data yang dimiliki Kadin

harus terintegrasi dengan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bogor.

"Jadi data yang kita miliki dengan data Kadin harus terintegrasi, sehingga jelas bagaimana kita bisa memetakan kebijakan untuk UMKM di Kabupaten Bogor," ungkap Iwan Setiawan.

Iwan Setiawan menambahkan, pihaknya ingin satu data UMKM ini dikomparatif, kalau memang datanya akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, kita gabungkan saja dan bisa kita gunakan. Ia berharap agar Kadin terus membantu memperkuat sektor UMKM serta melanjutkan berbagai program kegiatan dalam gerakan kemitraan inklusif.

"Membantu UMKM mendapatkan mitra, akses pasar dan pembiayaan agar UMKM bisa naik kelas sekaligus menjaga perekonomian tetap tumbuh," ujar Iwan.

Berikutnya, Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Cucu Sutara menuturkan, dirinya mengapresiasi Rapimkab II ini, hadirnya Plt. Bupati Bogor beserta jajaran Forkopimda adalah bukti dukungan agar



Plt Bupati Iwan Setiawan, Ketua Kadin Kabupaten Bogor Sintha Dec Checawati dan Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Cucu Sutara, Rapimkab II Kadin Kabupaten Bogor, Babakan Madang, Kabupaten Bogor Ksmis (9/3/2023).

Kadin lebih berkontribusi untuk Kabupaten Bogor. Kadin adalah mitra strategis yang mandiri bagi pemerintah, tugas kita memfasilitasi pemerintah dengan para pengusaha.

"Saya mengapresiasi hari ini ada launching big data UMKM Kabupaten Bogor, saya ingat kalau kita bicara big data UMKM, jangan lupa persiapan juga digital marketing-nya, supaya UMKM kita bisa menjangkau pasar ekspor," tutur Cucu.

Cucu mengatakan, saya berharap produk UMKM kita yang sudah luar biasa, bisa masuk ke toko modern. Kadin harus hadir menjadi solusi sesuai amanat undang-undang dan sebagai mitra strategis pemerintah.

"Mari duduk bersama untuk merumuskan kebijakan sesuai kapasitasnya masing-masing untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor. Mari kita bangun Kabupaten Bogor lebih baik, de-

ngan sinergi yang inklusif dan implementatif," kata Cucu.

Rapimkab II Kadin Kabupaten Bogor mengusung tema "Mewujudkan Kadin Kabupaten Bogor Sebagai Rumah Bersama Pelaku Usaha yang Transformatif, Inklusif dan Kolaboratif". Turut mendampingi Plt. Bupati Bogor, Kepala Bappedalitbang, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala DP3AP2KB. ● gio

Iwan Setiawan Optimis TP-PKK Bogor Mampu Tangkal Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba



Plt Bupati Bogot Iwan Setiawan , Jadi Duta Anti Narkoba Mampu Tangkal Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba

BOGOR (IM) - know Plt. Bupati Iwan Setiawan berharap dikukuhkannya TP-PKK Kabupaten Bogor sebagai Duta Anti Narkoba Kabupaten Bogor Tahun 2023, di Auditorium Setda, Kamis (9/3/23).

Iwan Setiawan menjelaskan, bahwa salah satu tugas PKK kabupaten, kecamatan dan desa sebagai duta anti narkoba, pertama melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya penyalah-

gunaan narkoba, dimulai dari tingkat keluarga, lingkungan sekitar dan masyarakat.

"Duta ini kan utusan ya, kalo utusan ini pasti mereka adalah orang-orang terpilih. Saya yakin sudah teruji ketokohnya, sudah teruji jiwanya, sudah teruji jiwa sosialnya," ungkap Iwan Setiawan.

Dalam kesempatan ini ia juga menyatakan terima kasih kepada BNN Jabar yang telah

menjadikan Kabupaten Bogor sebagai prototype pembentukan Duta Anti Narkoba. Ini menjadi penghormatan bagi Iwan Setiawan sebagai Plt. Bupati Bogor, telah menjadikan Kabupaten Bogor sebagai prototype pembentukan Duta Anti Narkoba.

"Saya sangat apresiasi dari 27 Kota/Kabupaten se-Jawa Barat, baru Kabupaten Bogor yang telah memiliki Duta Anti Narkoba dari tim TP-PKK. Pencegahan ini kami kolaborasi dengan PKK agar pelaksanaan program P4GN terutama mengoptimalkan kampanye anti narkoba bisa masif tersampaikan dari tingkat keluarga, RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten dan kota," paparnya. Di tempat yang sama, Ketua, ujan.

TP-PKK Kabupaten Bogor, Halimatussadiyah Iwan menuturkan, penguatan Duta Anti Narkoba merupakan upaya untuk menangkal bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkup keluarga, lingkungan dan masyarakat. Peran PKK dalam

pencegahan penyalahgunaan narkoba itu dilakukan dengan cara optimalisasi 10 program pokok PKK, dimana kegiatan yang berkaitan dengan narkoba masuk ke dalam program PKK.

"Kami senantiasa sinergi dengan Pemkab Bogor untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Bogor. Kesadaran hukum bela negara kita terus sosialisasikan kepada masyarakat terutama kepada mereka usia remaja untuk meminimalisir kenakalan remaja. Kami PKK akan selalu terdepan untuk hal ini," jelasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, yakni Perwakilan Kepala BNN RI, perwakilan Kepala Bakesbangpol Jabar, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Bogor, Kepala BNN Kabupaten Bogor, Kepala BNN Kota Depok, Kepala BNN Kabupaten Karawang, Camat se-Kabupaten Bogor, Ketua TP-PKK Kecamatan, Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Bogor, serta Kepala Bank BJB Kabupaten Bogor. ● gio